

Mutrofin

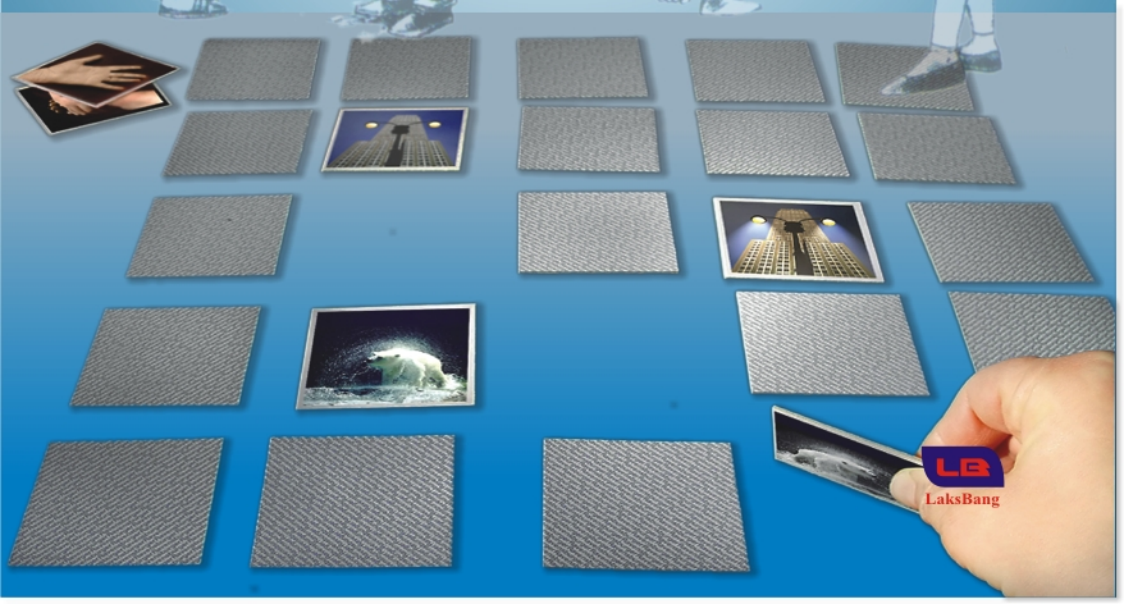
Pengantar

Metode Riset

EVALUASI

Untuk:

- Kebijakan • Program • Proyek



PENGANTAR METODE RISET EVALUASI

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
-
-

Mutrofin

Pengantar

Metode Riset

EVALUASI

Untuk:

● Kebijakan ● Program ● Proyek

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Mutrofin

Pengantar Metode Riset Evaluasi/ Penyunting Tjiptaning S.
Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, Cet. I, ed. Desember 2005, 223
hlm. + x hlm.; 21 cm

Bibliografi: hlm. 221
ISBN: 979-99431-9-1

1. Penelitian I. Judul
II. Mutrofin III. Tjiptaning Suprihati

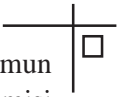
001.42

Penyunting : Tjiptaning Suprihati
Desain Sampul : Citra Hartati Lazuardi
Lay-out : w@kh.yUdin
Pencetak : PT. Kurnia Kalam Semesta, Yogyakarta

PENGANTAR PENYUSUN

Adewasa ini para mahasiswa ilmu-ilmu sosial, kesehatan masyarakat, ilmu budaya, psikologi, ekonomi, sosial ekonomi pertanian, serta mahasiswa keguruan dan ilmu pendidikan mengenal berbagai macam metode riset dalam mata kuliah Metodologi Riset. Seiring dengan tumbuh kembang sains sosial dan perilaku yang cukup pesat, metodologi riset pun mengalami perkembangan yang setara sebagai bagian dari *the journey of knowledge* masing-masing disiplin. Jika sebelumnya hanya dikenal metode-metode riset seperti riset deskriptif (studi kasus, survei, riset perkembangan, riset lanjutan/*follow-up-study*, analisis dokumen, analisis kecenderungan dan riset korelasional); riset sejarah; riset *Ex Post Facto*; dan riset partisipatori, maka sekarang dikenal metode-metode riset lain seperti riset tindakan (tindakan kelas), riset operasi, meta analisis, riset pasar, riset kebijakan dan riset evaluasi.

Kehadiran buku-buku teks tentang metode-metode riset tersebut jelas sangat membantu problem utama para mahasiswa yang akan menulis skripsi, thesis dan disertasi, termasuk di dalamnya mereka yang menjadi periset pemula dan yang memang sehari-hari secara profesional bekerja di bidang riset sosial dan perilaku. Sejauh menyangkut sumber-sumber kajian metode-metode riset yang tergolong riset dasar dan terapan, barangkali tidak ada persoalan

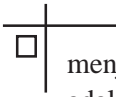


karena tersedia cukup lengkap dalam edisi bahasa Indonesia. Namun terkait dengan metode riset evaluasi, belum banyak para akademisi di Indonesia yang menulisnya. Hal itu disebabkan, selain metode riset evaluasi yang semula termasuk dalam kategori riset terapan relatif baru dikembangkan sebagai metode tersendiri sejak tahun 1970-an, juga karena tidak banyak perguruan tinggi di Indonesia yang membuka program studi evaluasi.

Sebagai negara berkembang yang bergelimang dengan banyak aktivitas, program, proyek dan produk pembangunan, pada prinsipnya Indonesia memerlukan kerja evaluator yang memiliki keahlian profesional untuk meneliti hasil suatu aktivitas, program, proyek, dan produk pembangunan dimaksud. Metode riset evaluasi adalah sarana intelektual yang paling relevan untuk mengukur proses, hasil, dampak, dan sustainabilitas (tingkat keberlanjutan) suatu aktivitas, program, proyek, dan produk pembangunan sosial serta masyarakat. Oleh karena itu, panduan metode riset evaluasi – dalam batas-batas tertentu – tetap saja menjadi kebutuhan tak terelakkan.

Pada konteks itulah – sebagaimana akan dijelaskan kemudian – wacana akademik yang sederhana ini disampaikan kepada publik dengan harapan akan menjadi instrumen pelengkap yang bisa dimanfaatkan untuk pekerjaan riset. Jujur harus diakui, substansi materi, sistematika penyajian dan kelengkapan sumber-sumber rujukan yang termaktub dalam buku ini masih jauh dari memadai. Namun derajat keberartian jelas tidak dibebankan kepada kehadiran buku ini, melainkan tetap berpulang kepada para mahasiswa, periset pemula dan para periset yang akan ringan pikiran untuk tetap melakukan pencarian referensi secara komprehensif dan melakukan konsultasi intensif dengan para seniornya yang lebih berpengalaman di bidang riset evaluasi.

Tujuan dari buku ini adalah untuk menyediakan suatu pengantar ke bidang riset evaluasi bagi mereka yang posisi, ketertarikan akademis, atau keingintahuan alamiahnya menginspirasi mereka untuk ingin mempelajari bagaimana riset evaluasi dilaksanakan. Buku ini hanya sebagai langkah awal perjalanan panjang untuk

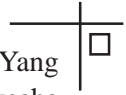


menjadi seorang tenaga ahli teknis di bidang riset evaluasi. Tujuannya adalah untuk memperlengkapi orang-orang yang harus melaksanakan administrasi dan manajemen program sumberdaya manusia dengan pemahaman akan tugas dan aktivitas riset evaluasi yang memadai agar dapat memberikan putusan bagi diri mereka sendiri sehubungan dengan jenis riset evaluasi apa yang sesuai dengan program dan proyek mereka, dan agar dapat memahami hasil dari berbagai kajian lengkap yang relevan dengan organisasi mereka. Kami telah mencoba untuk menyediakan wacana yang bisa membantu bagi mereka yang melaksanakan atau yang berencana untuk melaksanakan riset evaluasi, yang dikontrak untuk melaksanakan riset evaluasi, yang mengawasi personalia riset evaluasi, dan para konsumen riset evaluasi.

Buku sederhana ini tentu tidak mungkin dapat terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan kritik dari berbagai pihak, terutama dari para pakar evaluasi di lingkungan Program Studi Metodologi Evaluasi pada Program Doktor, Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk itulah patut kiranya disampaikan rasa terimakasih yang setinggi-tingginya kepada mereka. Kepada para mahasiswa Metodologi Evaluasi, baik yang semula meragukan maupun yang dengan penuh antusias mendukung terselesaikannya buku ini, juga disampaikan penghargaan yang setulus-tulusnya.

Pada akhirnya, tanggung jawab ilmiah tetap berada di pundak penyusun. Kami gunakan istilah penyusun, bukan penulis karena kami pada hakikatnya tidaklah menulis atau mengarang, melainkan menyusun ragam informasi secara terorganisasi dan komprehensif mengingat filosofi kami tentang ilmu pengetahuan amatlah sederhana, yakni apa yang bisa disajikan kepada kaum terpelajar dan bagaimana mereka memahaminya. Kiranya teman-teman sejawat dan para pembaca dapat memberikan masukan yang konstruktif guna penyempurnaan bahan-bahan kajian ini di masa-masa mendatang. Mudah-mudahan, meskipun dalam bentuknya yang penuh keterbatasan, bahan kajian ini tetap memberi kontribusi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan di Indonesia dan kepada mereka yang berkehendak

untuk mendalami studi evaluasi secara serius. Semoga Tuhan Yang Maha Esa tidak pernah berpaling dari kita yang secara ikhlas berusaha menguak rahasia ciptaanNya.



Lereng Merapi, Desember 2005
Penyusun,

Mt

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENYUSUN v

DAFTAR ISI ix

Bab I

PENDAHULUAN 1

A. Konteks Riset Evaluasi 1

B. Daya Guna Riset Evaluasi 17

C. Pelaksana Riset Evaluasi 22

Bab II


DESKRIPSI KONSEPTUAL RISET EVALUASI 33

A. Latar Belakang Sejarah 33

B. Makna Riset Evaluasi 39

C. Karakteristik 44


D. Tujuan 55

E. Fungsi-fungsi 63

Bab III

**KETERAMPILAN METODOLOGIS DAN
PENDALAMAN PROGRAM** 69

A. Keterampilan Metodologis 69

B. Identifikasi Tujuan Program 73

C. Mengenali Karakteristik Program 76

D. Penetapan Kriteria, Standar dan Indikator 77



Bab IV

PENDEKATAN DAN ORIENTASI RISET EVALUASI

87

- A. Studi Berorientasi Politik (*Pseudo-Evaluations*) 90
- B. Studi Berorientasi Pertanyaan (*Quasi-Evaluation*) 93
- C. Studi Berorientasi Nilai (*True-Evaluation*) 99

Bab V

DESAIN RISET EVALUASI

- A. Desain Eksperimental 121
- B. Desain-desain Kuasi Eksperimental 134
- C. Desain-desain Non-eksperimental 138
- D. Desain Evaluasi Komparatif 142
- E. Desain Berbasis Teori dan Replikasi 148
- F. Analisis *Cost-Benefit* (Analisis Masalahat-Biaya) 149

Bab VI

SISTEMATIKA PROSES RISET EVALUASI

- A. Skema Proses Model IEES 157
- B. Skema Proses Model FAO/Soekartawi 178

Bab VII

SISTEM PELAPORAN DAN PROMOSI HASIL

- A. Sistem Pelaporan 191
- B. Promosi Hasil 198

Daftar Kepustakaan 205

Glossary 215

Identitas Penyusun 221

Identitas Editor 223

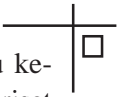
Bab I

PENDAHULUAN

A. KONTEKS RISET EVALUASI

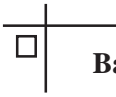
Sebetulnya riset evaluasi adalah bagian riset terapan seperti halnya riset kebijakan, namun sejak tahun 1970-an riset evaluasi dibedakan dengan riset dasar dan riset terapan mengingat tujuannya yang spesifik. Sebagaimana dijelaskan Kline (1980), riset evaluasi dimaksudkan untuk mengukur hasil suatu kebijakan, program, proyek, produk atau aktivitas tertentu. Riset evaluasi pada umumnya memfokuskan diri pada dunia praktikal terutama intervensi program atau proyek yang dilaksanakan untuk kepentingan pembangunan manusia dan kemaslahatannya. Tujuan spesifik yang dimaksud ialah membuat keputusan mengenai nilai suatu kebijakan, program atau proyek, produk atau aktivitas, baik untuk kepentingan perbaikan, sustainabilitas (keberlanjutan), terminasi (pengakhiran atau penghentian) maupun untuk akuntabilitas publik.

Pertanyaannya ialah, dalam konteks apa eksistensi riset evaluasi ditempatkan dan menemukan relevansinya? Guna menjawab pertanyaan tersebut agaknya perlu dikemukakan peranan dan kontribusi para ilmuwan dan periset sosial karena riset evaluasi pada prinsipnya merupakan bagian dari riset sosial dan aktivitas riset ilmuwan sosial pada umumnya.

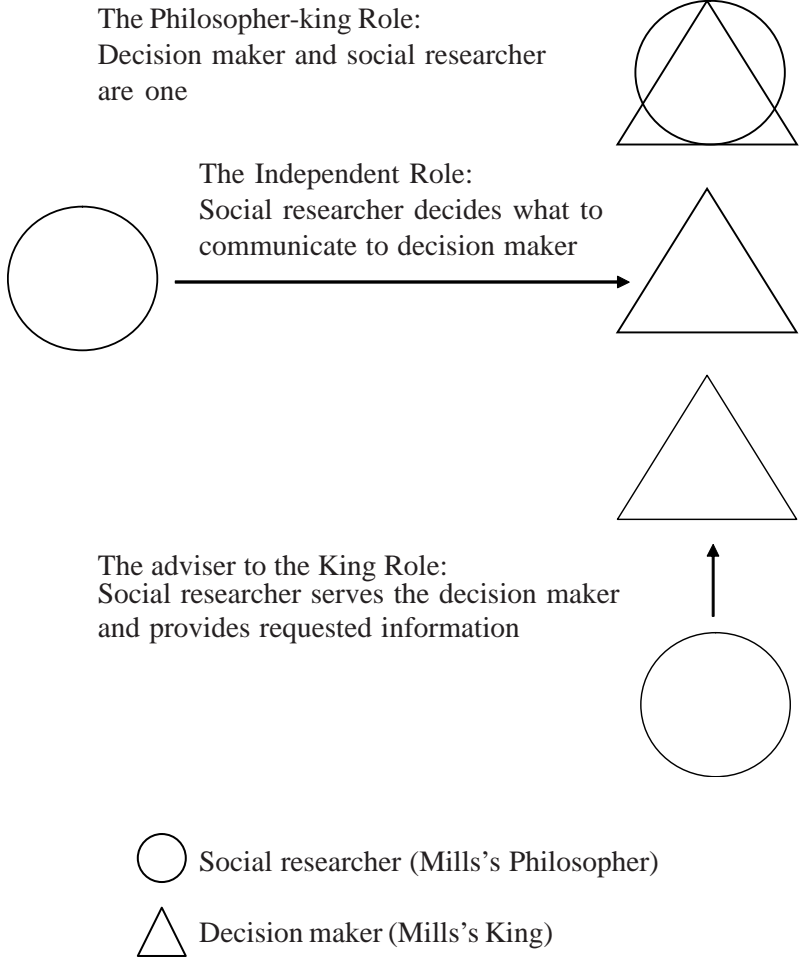


Dewasa ini kecenderungan dan perkembangan terbaru ke-masyarakat mengarah pada perluasan peran ilmuwan dan periset sosial dalam kancah riset kebijakan. Apabila seseorang menganalisis masyarakat berdasarkan sektor–sektor aktivitas (kegiatan) utamanya, maka pengetahuan harus dianggap sebagai sektor yang pertumbuhannya tercepat (Finsterbusch & Motz, 1980). Kecenderungan pertumbuhan tersebut terkait erat dengan eskalasi kompleksitas masyarakat seperti yang terjadi dengan meningkatnya interdependensi (saling-ketergantungan) sektor kemasyarakatan dan pengaruh massif aksi manusia terhadap lingkungan.

Menyadari hal itu, maka kelompok-kelompok strategis seperti pemerintah, organisasi-organisasi profesi, para profesional, TNI dan Polri, badan-badan usaha profit dan berbagai organisasi non-pemerintah berupaya mendapatkan basis pengetahuan yang lebih mendalam untuk kebutuhan pengambilan keputusan atau kebijakan yang pada gilirannya akan di-*breakdown* menjadi program dan unit terkecilnya, yakni proyek. Muncul kesadaran bahwa pengetahuan yang diperlukan tidaklah sepenuhnya dapat dipasok oleh hasil-hasil riset formal pada umumnya.

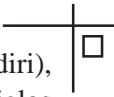


Bagan 1.1: Peran Periset Sosial bagi Pengambil Keputusan



Sumber: Finsterbusch & Motz, 1980.

Pada level itu, demikian penjelasan Mills (Finsterbusch & Motz, 1980), sekurang-kurangnya ilmuwan dan periset sosial memiliki tiga peranan dalam lingkungan publik, yakni sebagai *philosopher-king*



(pemikir bawahan raja), *independent philosopher* (pemikir mandiri), dan *adviser to the king* (penasihat raja). Pada Bagan 1.1 jelas diperlihatkan, peran pertama ilmuwan dan periset sosial menduduki posisi dalam kekuasaan dan sekaligus dianggap sebagai cendekiawan yang sangat cerdas dan berpengetahuan luas. Peranan demikian termasuk peran langka. Di Amerika Serikat tercatat beberapa yang amat terkenal, misalnya Woodrow Wilson, Daniel P Moybihan, dan Henry Kissinger, yang pernah membuat kebijakan dan goresannya pada sejarah AS membekas sangat dalam. Pada masa Orde Baru (1966-1998) di Indonesia tercatat antara lain nama-nama besar seperti Soemitro Djojohadikusumo, JB. Sumarlin, Daoed Joesoef, Moekti Ali dan B.J. Habibie.

Peran kedua menuntut agar seorang ilmuwan dan periset sosial berupaya tetap independen dengan selalu menjaga jarak terhadap kekuasaan. Pada umumnya mereka bekerja dan berkarya secara mandiri, memilih permasalahannya sendiri, namun mengarahkan karya-karyanya kepada penguasa dan publik. Ilustrasi yang menonjol dari peran independen - sekaligus ilustrasi yang menunjukkan dilema nilai yang dihadapi oleh periset sosial - misalnya pilihan permasalahan riset oleh Jay Schulman dan koleganya (1973) di AS. Schulman yakin bahwa suasana tahun 1970-an - pada saat "Harrisburg Seven" (pengecam keras perang Vietnam) sedang menjalani sidang atas tuduhan persekongkolan - dapat mendorong munculnya pilihan *juri* yang bias, dan bahwa latar-belakang sosial, politik, dan ekonomi anggota *juri* dapat mempengaruhi keputusannya, dengan demikian memperkecil kemungkinan adanya proses peradilan yang *fair*. Schulman dan rekan-rekannya terus mengkaji berbagai atribut yang disandang para anggota *juri* untuk memastikan cara penyeleksian yang kurang menimbulkan bias. Modus operandi mereka sangat efektif. Publikasi mengenai kajian seleksi anggota *juri* memikat kalangan luas. Horowitz dan Katz (1975) melaporkan bahwa Komite Nasional Republik - selama persidangan terkait skandal *Watergate* yang pada saat itu sedang memproses Jaksa Penuntut Umum John Mitchell dan Maurice H Stans (Ketua Pencari Dana dan Sekretaris Perdagangan Presiden Nixon terdahulu) -



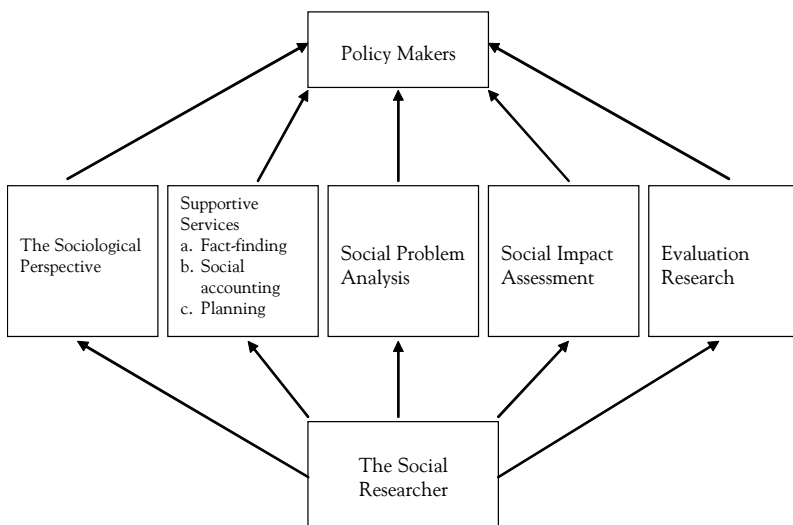
meminta agar Schulman mau menjabat salah satu pos dalam kabinet, namun Schulman menolak kedudukan tersebut. Barangkali penolakan tersebut lebih berdasarkan pada pertimbangan moral. Tawaran itu disepakati oleh salah seorang rekannya, dengan dua syarat: (1) juri yang dipilih harus *fair*, dan (2) Komite Nasional Republik bersedia memberi kontribusi yang berasal dari koceknya sendiri untuk berbagai “akibat radikal” dari pilihannya.

Kasus tersebut menggaris-bawahi fakta bahwa prosedur riset sains sosial dapat digunakan untuk kepentingan berbagai macam persuasi yang bersifat politis maupun moral. Reaksi dari dua ilmuwan sosial, anggap saja mereka mewakili suara kaum kiri sampai kanan, menjelaskan hubungan tindakan riset dengan nilai pribadi. Selanjutnya, kegiatan Schulman menyadarkan para penguasa bahwa mereka dapat belajar dari para ilmuwan sosial. Di Indonesia, peran demikian dimainkan secara cemerlang oleh Soedjatmoko, Moebiyarto, Ignas Kleiden, Mochtar Pabottingi, Indria Samego, Ichlasul Amal dan beberapa ilmuwan lain yang cenderung memilih berada di luar lingkaran kekuasaan namun tetap berkarya di bidangnya untuk tetap kritis kepada penguasa dan berpihak kepada publik.

Sebagian besar ilmuwan sosial mengambil peran yang ketiga, yaitu peran “penasihat raja” (*adviser to the king*). Mereka adalah kaum teknokrat yang menyumbangkan informasi berguna bagi orang lain. “Raja” di sini pada umumnya seorang pejabat birokrasi atau eksekutif, yang dapat meminta bantuan ilmuwan sosial secara temporer, terus-menerus, atau bahkan *full-time*. Meskipun penasihat mungkin bekerja pada salah satu kantor pemerintah di daerah atau pemerintah pusat, atau pada salah satu perusahaan kontraktor yang melayani sektor publik maupun swasta, namun sering juga mereka ditempatkan di salah satu universitas, organisasi kependidikan, kantor badan perencanaan pembangunan atau layanan sosial. Tidak peduli seberapa sering mereka dimintai bantuan atau di mana tempat mereka bekerja, penasihat biasanya memberikan berbagai macam informasi sebagaimana dibutuhkan dan melaksanakan berbagai macam tugas borongan.

Layanan yang dapat diberikan ilmuwan dan periset sosial dengan peranan seperti ini dapat dikategorikan sebagai layanan: (1) perspektif sosiologis; (2) layanan yang bersifat mendukung (*supportive*); (3) analisis permasalahan sosial; (4) asesmen dampak sosial; dan (5) riset evaluasi. Kategori-kategori ini bukan merupakan kategori yang saling mengucilkan (*mutually exclusive*) (sebagaimana ditunjukkan pada Bagian 1.2). Di Indonesia, peran seperti itu dilembagakan dalam bentuk Staf Ahli atau konsultan. Masri Singarimbun dan Ida Bagus Mantra adalah contoh ilmuwan dan periset sosial yang sukses dalam peran ini ketika pemerintah menggulirkan program Keluarga Berencana.

Bagian 1.2: Kontribusi Ilmuwan Sosial terhadap Pengambil Kebijakan



Sumber: Finsterbusch & Motz, 1980.

Jadi, seorang periset evaluasi dan atau evaluator adalah periset sosial yang pekerjaannya utamanya bertumpu pada program dan proyek. Tentu saja jarak jangkau riset evaluasi bukan semata-mata untuk kepentingan program, proyek, produk atau aktivitas ter-

□ tentu melainkan dapat lebih luas dari itu, yakni pada level kebijakan, baik kebijakan pemerintah nasional dan daerah, maupun kebijakan yang diambil oleh para eksekutif secara institusional di kalangan pemerintah dan swasta.

Dewasa ini sudah banyak riset evaluasi dilaksanakan secara sistematis untuk program aksi yang bersifat terorganisasi dan mengarah pada kejelasan tujuan. Kajian Rossi & Freeman (1985) menjelaskan bahwa riset evaluasi merupakan suatu bidang aktivitas yang *robust* (kaya), yang dicurahkan untuk pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi mengenai kebutuhan, implementasi, dan dampak upaya intervensi yang bertujuan untuk memperbaiki nasib umat manusia melalui usaha peningkatan kondisi sosial dan kehidupan komunitas. Menurut mereka, riset evaluasi dilaksanakan dengan berbagai alasan. *Pertama*, untuk menilai sampai sejauh mana pentingnya program yang sedang berjalan dan untuk mengestimasi seberapa besar kegunaan upaya peningkatannya. *Kedua*, untuk menilai kebermanfaatan program dan inisiatif yang bersifat inovatif. *Ketiga*, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen dan administrasi program. *Keempat*, untuk memenuhi berbagai macam persyaratan akuntabilitas. Riset evaluasi dengan demikian juga dapat memberikan kontribusi untuk pengetahuan ilmu sosial yang bersifat substantif dan metodologis.

Pada perencanaan program intervensi sosial, fokus riset evaluasi terletak pada tingkat keluasan dan kedalaman permasalahan yang membutuhkan intervensi sosial, dan pada desain program peningkatannya. Hal itu disebabkan, dalam menjalankan program inovatif yang ada, terdapat kekhawatiran, apakah program akan mencapai populasi sasaran yang direncanakan dan menyediakan sumberdaya, layanan, serta kemaslahatan sebagaimana yang menjadi visi misinya? Mengingat intervensi diimplementasikan dan dilanjutkan, maka ada kepentingan untuk mengetahui apakah intervensi tersebut efektif sampai taraf tertentu, dan apabila memang benar demikian, seberapa jauh dampaknya? Demi akuntabilitas dan perencanaan di masa depan, yang perlu digaris-bawahi adalah bagaimana mempertimbangkan biaya yang terkait dengan masalah, dan

membandingkan efisiensi biaya intervensi dengan efisiensi biaya strategi alokasi sumberdaya lainnya.

Sejumlah riset evaluasi bersifat komprehensif dan mempertimbangkan semua pertanyaan tersebut; sementara sejumlah lainnya terarah hanya pada sebagian di antaranya. Pada semua kasus riset evaluasi yang telah dilaksanakan, sasarannya adalah menyediakan temuan yang sevalid dan sereliabel mungkin meskipun selalu terdapat berbagai kendala politis dan etis serta berbagai limitasi yang disebabkan oleh ketersediaan waktu, finansial maupun sumberdaya manusianya.

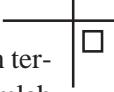
Sebagai negara berkembang, Indonesia sejak tahun 1969 telah memulai program pembangunan untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan warga negaranya. Hasil riset evaluasi menunjukkan, ada program yang berhasil dengan baik, *on-track*, dan mencapai tujuan serta sasaran yang luas, ada pula program yang gagal total tidak menghasilkan dampak apapun kecuali penghamburan biaya secara percuma bahkan menumbuhsururkan ladang korupsi, kolusi dan nepotisme belaka. Beberapa di antaranya dapat dilihat pada contoh berikut.

1. Program Keluarga Berencana (KB) yang substansinya adalah mengatur jarak reproduksi kaum perempuan dengan semboyan yang amat populer “dua anak cukup, tiga banyak” dapat dikatakan berhasil meskipun pada awalnya mendapat tantangan kultural dan religius yang sangat kuat. Pengambil keputusan dan eksekutif melakukan segala macam cara dan daya untuk menerapkan intervensi program KB. Mulai dari penyediaan anggaran yang cukup, tenaga lapangan (PLKB, Petugas Lapangan Keluarga Berencana) yang terlatih dalam jumlah yang memadai, alat-alat kontrasepsi dalam jumlah besar, mendirikan pusat-pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) berikut tenaga dokter dan paramedisinya, sampai dengan upaya membujuk para ulama dan pemuka agama lain agar ikut serta mensosialisasikan KB. Hasilnya, terjadi perubahan tata nilai di mana para keluarga muda akan merasa malu apabila memiliki banyak anak. Eksplosif angka kelahiran




bisa ditekan, jumlah ibu yang meninggal dunia karena melahirkan berkurang signifikan.

2. Sejak tahun 1984, digulirkan Program Kewajiban Belajar Enam Tahun dan sepuluh tahun kemudian (1994) dilanjutkan dengan Program Kewajiban Belajar Sembilan Tahun (Enam tahun di jenjang Sekolah Dasar ditambah tiga tahun di jenjang Sekolah Menengah Pertama). Hasilnya juga cukup baik, angka partisipasi pendidikan (kasar dan murni) di banyak daerah meningkat tajam. Terjadi ledakan lulusan SMP sehingga mengharuskan pemerintah mendirikan SMA/SMK sampai tingkat daerah kecamatan. Namun akibat krisis moneter dan ekonomi sejak tahun 1997, sustainability program tersebut mengalami hambatan serius sampai dengan diserahkannya kewenangan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah kepada Pemkab/Kota sejak tahun 2000 di bawah payung hukum UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian disempurnakan menjadi UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Di bidang pertanian, sebagaimana dilaporkan Bamberger & Cheema (1993), Proyek Rehabilitasi dan Irigasi Pertama yang dibiayai pinjaman Bank Dunia telah berhasil meningkatkan produksi padi dan ketersediaan pengairan persawahan di Jawa secara kontinyu sehingga mengantarkan Indonesia pada posisi sebagai Negara berkembang dengan kemampuan swasembada beras. Posisi tersebut mengantarkan Presiden Soeharto ketika itu mendapatkan penghargaan dan diberi kesempatan untuk menjelaskan keberhasilannya dalam Sidang Dewan Pangan Sedunia di markas besar PBB. Proyek tersebut juga memberikan dampak positif selama kurang lebih 25 tahun terhadap dilaksanakannya program transmigrasi dari Jawa ke luar Jawa.
4. Dalam bidang politik, pemerintah Orde Baru di bawah kendali Soeharto menerapkan kebijakan penyederhanaan partai politik melalui lima paket Undang-undang Politik yang sangat efektif dalam menciptakan stabilitas politik nasional. Hasilnya, pemerintahan otoritarian Orde Baru berjalan efektif tanpa kendala berarti



untuk masa sekitar 30 tahun. Pemilihan Umum lima tahunan terselenggara selama enam kali. Partai politik yang semula berjumlah puluhan bahkan ratusan dipangkas menjadi 10 hingga terakhir menjadi tiga partai, yakni Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia dan Golongan Karya. Sampai runtuhnya Orde Baru 1998, Partai Golkar yang pada masa Orde Baru menjadi partai pemerintah, tetap kuat tak terkalahkan oleh partai lain yang muncul kemudian dalam jumlah puluhan hingga dalam Pemilu 2004 masih tetap menjadi pemenang Pemilu. Bahkan ketika Otonomi Daerah diberlakukan dan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung diselenggarakan, Partai Golkar secara signifikan mendominasi kemenangan Pilkada di seluruh Indonesia. Hal itu menunjukkan, program dan proyek politisasi Orde Baru benar-benar berhasil dan mencapai sasaran populasi yang amat luas.

5. Pada tingkat Departemen hampir seluruh departemen pemerintah melaksanakan program *multi years* yang bersifat jangka panjang lebih dari setahun meskipun ada yang berhasil, ada pula yang gagal. Proyek pengembangan kurikulum di Departemen Pendidikan misalnya, secara kontinyu berhasil memperbarui kurikulum pendidikan sekolah dalam jangka waktu 10 tahunan sejak 1975. Namun proyek PPSP (Proyek Pengembangan Sekolah Pembangunan) di tahun 1980-an gagal dilaksanakan.
6. Sejak krisis ekonomi dan moneter 1997, banyak sekali program dan proyek yang dilaksanakan untuk menanggulangi dampak krisis dan dilaksanakan dalam jangka panjang lebih dari setahun. Program-program dan proyek dimaksud antara lain ialah Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), Proyek Pembangunan Prasarana Desa Tertinggal (P3DT), Pemberdayaan Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE), Program Pendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (P2MPD), dan lain-lain.



Berikut ini adalah contoh-contoh program yang dikutip dari tulisan karya Rossi & Freeman (1985).

1. Dengan dukungan dari Departemen Kehakiman AS, sejumlah komunitas mengembangkan program untuk meningkatkan visibilitas (kemudahan untuk dilihat/ditemui) polisi, dengan asumsi bahwa kejahatan (kriminalitas) yang mengancam orang dan harta akan berkurang sehubungan dengan pengaruh persepsi masyarakat yang menangkap adanya peningkatan kehadiran polisi.
2. Di empat kota utama di Amerika Serikat, yayasan swasta besar bersedia menanggung biaya operasi untuk pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) di beberapa daerah berpenghasilan rendah. Pusat-pusat ini didesain untuk mengurangi tingginya biaya rawat pasien *ambulatory* yang ditanggung klinik rawat jalan dan ruang gawat darurat rumah sakit, dan sebagai penyedia alternatif untuk rawat inap rumah sakit yang mahal dan memakan waktu lama. Berbagai macam upaya lain dilaksanakan untuk menyediakan perawatan medis ekonomis (murah) bagi kaum miskin dan untuk menutup biaya perawatan kesehatan yang akan dilaksanakan di seluruh Amerika Serikat. Evaluasi meneguhkan bukti bahwa pusat kesehatan komunitas lebih hemat dibandingkan dengan klinik-klinik rumah sakit. Di Indonesia, sejak 2005 pemerintah menggulirkan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) bidang kesehatan yang antara lain memberikan pengobatan gratis dan rawat inap secara gratis di Rumah Sakit pemerintah Kelas III kepada keluarga miskin (Gakin) yang memegang Kartu Sehat.
3. Di negara Amerika Latin yang luas, televisi pendidikan digunakan untuk menurunkan angka buta huruf penduduknya. Suatu program televisi pendidikan yang berjudul *Plaza Sesamo* dibuat dengan memodifikasi program televisi AS *Sesame Street*, dan menayangkannya pada jam-jam yang memungkinkan anak dapat menontonnya. Program televisi pendidikan serupa juga telah dicoba di banyak negara, termasuk di Indonesia. Kegunaan dan efisiensi berbagai upaya ini masih dapat dipertanyakan ditinjau berdasarkan biaya sampai maslahatnya.